

DAFTAR PUSTAKA

A.SUMBER BUKU

Agus, D. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik*. Gadjah Mada University Press.

Arrasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

As'ad, M. (2002). *Psikologi Industri Seri Ilmu Sumber Daya Manusia. Edisi Ke Empat*. Liberty.

Ashiddiqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru van Hoeve.

Atmosudirjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.

Azhary, M. T. (1992). *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang.

Budiardjo, M. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.

Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia.

HR, Ridwan. (2011). *Hukum administrasi negara*. Rajawali pers.

Ismiati, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. DeePublish (CV Budi Utama).

Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

- Kurniawan, H. (2015). *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas* (cetakan pertama). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni.
- Manan, B. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Alumni.
- Marbun, S. F. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. FH UII Press.
- Nuraeny, H. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rajawali pers.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Putra, I. . W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya.
- Rivai, S. (2019). *Mari Belajar Ekonomi: Buku Perminatan Ilmu Sosial* Uwais. Inspirasi Indonesia.
- Salim, I., & Yulianto, M. J. dkk (2021). *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Bappenas, KSP DAN JPODI.
- Smith, R. K. . (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (cetakan pertama). Y\Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1993). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Alumni.
- Soemardi. (2010). *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta. Media Indonesia.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Wardani, I. (2008). *Pengantar pendidikan luar biasa*. Universitas Terbuka.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lakkas.

B.SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi

Dan Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

C.SUMBER LAIN

- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *TAPIS*, 9(2).
- Gaol, H. S. L. (2020). Syarat Sehat Jasmani Sebagai Diskriminasi Tenaga Kerja Difabel. *Inklusi*, 7(2), 207. <https://doi.org/10.14421/ijds.070202>
- Marbun, S. F. (1997). Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 4(9).
- Nanda, A. R., & Herawati, R. (2021). Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 325–336.
- Nilawaty, C. (2021). WHO Memperkirakan Jumlah Difabel Bertambah karena Dua Sebab Ini. *Tempo.co*. <https://difabel.tempo.co/read/1537446/who-memperkirakan-jumlah-difabel-bertambah-karena-dua-sebab-ini/full&view=ok>
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS*. <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>
- Putri, D. A. (2020). *Amputasi: Penyebab, Prosedur, Pemulihan, dll*. Dokter sehat.

<https://doktersehat.com/penyakit-a-z/penyakit-otot-postur-tubuh/amputasi/>

- Rahardjo, S. (2007). *Membedah Hukum Progresif* (I. Gede, A.B.Wiranata, J. Emirzon, & F. Muntaqo (ed.)). Kompas.
- Rahayu, S., Dewi, U., & Ahdiyana, M. (n.d.). Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *socia*, 10(2), 108–109.
- Umam, M. M., & Arifin, R. (2019). *Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 18(1), 46–54.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142.
- Wignjosoebroto, S. (2003). *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation.
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>
- Sugiono, Ilhamuddin, & Rahmawan, A. (2014). Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance. *Indonesia Journal of Disability*, 1(1).

Susiana, & Warda. (2019). Indonesian Government Policies in Protecting the Rights of People with Disabilities in Getting a Job at Indonesian State-Owned Enterprises. 1st International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019). *Kemajuan Ilmu Sosial, Pendidikan dan Penelitian Humaniora*, 413(187).

Zakky. (2021). *Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Beserta Contoh dan Penjelasannya*. seluncur.id. <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/>